

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perburuan paus atau yang dikenal dengan *whaling* merupakan hal yang telah dilakukan oleh manusia sejak 2200 tahun sebelum masehi.<sup>1</sup> Aktivitas ini juga dilakukan oleh beberapa masyarakat Jepang. Hal ini dapat diketahui dengan adanya kebiasaan memakan daging paus dan dijadikannya aktivitas berburu paus sebagai ritual untuk menghormati arwah nenek moyang yang telah tiada.<sup>2</sup> Perburuan paus yang dilakukan oleh masyarakat Jepang ini merupakan bentuk kepercayaan dan kebudayaan yang dikenal dengan *Gyoshoku-bunka* atau tradisi memakan paus.<sup>3</sup> Selain itu juga terdapat bukti-bukti peninggalan sejarah berupa karya tulis, kesenian, dan situs-situs sejarah yang berhubungan dengan perburuan paus.<sup>4</sup>

Pada tahun 1906 Jepang mulai membangun pangkalan khusus untuk melakukan perburuan paus secara modern di Ayukawa. Kesuksesan perburuan paus dengan menggunakan metode secara modern memicu berdirinya pangkalan-pangkalan perburuan paus yang baru maupun perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang perburuan paus. Hal ini juga ditandainya industri perburuan paus secara modern di

---

<sup>1</sup> Lisa Kobayashi, "Lifting the International Whaling Commission's Moratorium on Commercial Whaling as the Most Effective Global Regulation of Whaling", *Environs: Environmental Law and Policy Journal* Vol 29:2, 2006, Hal. 180.

<sup>2</sup> Lisa Kobayashi, "Lifting the International Whaling Commission's Moratorium on Commercial Whaling as the Most Effective Global Regulation of Whaling", *Environs: Environmental Law and Policy Journal* Vol 29:2, 2006, hal 182.

<sup>3</sup> Keiko Hirata. "Why Japan Support Whaling," *Journal of International Law & Policy* Volume 8, Issue 2-3 (April 2005) : 20.

<sup>4</sup> S. Segi, *The Coexistence of Whaling and Whale Watching in Tradition Whaling Region: The Case of Taiji, Wakayama Prefecture Japan*, (SPC Traditional Marine Resource Management and Knowledge Information Bulletin #15, 2003), Hal. 21-25,

<https://www.academia.edu/381711/TheCoexistenceofWhalingandWhaleWatchingInaTraditionalWhalingRegionTheCaseofTaijiWakayamaPrefectureJapan>, diakses pada 10 September 2021

Jepang.<sup>5</sup>Seiring berkembangnya industri pada perburuan paus, Jepang mulai memperluas area perburuannya hingga ke wilayah Antartika pada pertengahan tahun 1930.<sup>6</sup>

Dalam rangka menghindari kepunahan spesies ikan paus, maka dibentuk Komisi Perburuan Paus Internasional (*International Whaling Commission*). IWC ini dibentuk untuk agar dapat menerapkan konvensi *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) tahun 1946.<sup>7</sup> Pada tahun tersebut IWC masih merupakan badan antar-pemerintahan yang mana banyak dari negara-negara anggotanya merupakan pelaku dalam industri perburuan paus. IWC menjalankan fungsi sebagai mengatur dan menjaga harga minyak ikan paus. Seiring berjalannya waktu, fungsi dan tujuan IWC berubah menjadi badan yang berfokus mengatur pembatasan dalam perburuan paus.<sup>8</sup> Jepang sendiri telah bergabung menjadi anggota IWC sejak 1951.<sup>9</sup> Di tahun tersebut, kebijakan perburuan paus Jepang mengenai adanya pembatasan terhadap jumlah perburuan ikan paus sejalan dengan kebijakan IWC yang juga berfokus terhadap pembatasan dalam hal perburuan ikan paus.

Melalui *Commertial Whaling Moratorium* pada tahun 1982 mengenai nol kuota paus untuk perburuan paus komersial dan mulai berlaku pada tahun 1987, fokus IWC berubah dari yang dahulunya sebagai pemanfaatan berkelanjutan ikan paus yang mana pengembangan industri perburuan ikan paus yang teratur menjadi konservasi paus yang

---

<sup>5</sup> Junichi Takahashi, Arne Kalland, Brian Moeran, Theodore C. Bestor, "Japanese Whaling Culture: Continuities and Diversities", *Maritime Anthropological Studies* Vol.2 No.2, 1989, Hal. 111

<sup>6</sup> Rupert Wingfield-Hayes, *Japan and The Whale*, BBC News, 2016, <http://www.bbc.com/news/world-asia-35397749>, diakses pada 10 September 2021

<sup>7</sup> International Whaling Commission, <http://iwc.int/convention>, diakses pada 3 September 2021

<sup>8</sup> International Convention for Regulation of Whaling, diakses melalui IWC-Archive <http://archive.iwc.int/pages/view.php?ref=3607&k>, diakses pada 3 September 2021

<sup>9</sup> Kyodo News, *Japan Withdraw From IWC to Resume Commercial Whale Hunting*, Kyodo News, 2019 <https://english.kyodonews.net/news/2019/06/895b5216c64f-japan-withdraws-fromiwc-to-resume-commercial-whale-hunting.html>, diakses pada 10 September 2021

mana menghentikan perburuan paus yang akan punah dan melindungi ikan paus.<sup>10</sup> Perubahan ini terjadi dari dalam komposisi keanggotaan IWC, oleh negara-negara yang *anti-whaling*. Hal ini terjadi karena beberapa negara anggota mengubah posisi mereka yang dahuluinya dari *pro-whaling* menjadi *anti-whaling*. Dan menjadi tekanan terhadap negara yang *pro-whaling* seperti Jepang, Norwegia, Islandia.<sup>11</sup>

Keputusan dari IWC dalam upaya untuk menghentikan perburuan paus melalui dibentuknya *Moratorium Commercial Whaling* (kوتا tangkapan nol) yang dilaksanakan pada tahun 1986.<sup>12</sup> Beberapa negara anggota melakukan penolakan terhadap moratorium, diantaranya negara Jepang, Norwegia dan Islandia. Jepang melakukan penolakan terhadap moratorium dan berencana untuk melanjutkan *commercial whaling*, namun tekanan datang dari negara Amerika Serikat dan akhirnya Jepang mengakhiri perburuan ikan paus komersial pada tahun 1987 dan berganti dengan melakukan *scientific whaling*.<sup>13</sup> Dalam praktek perburuan paus yang masih terjadi di Jepang, Greenpeace sebagai organisasi internasional yang fokus terhadap masalah eksploitasi perburuan paus berupaya untuk mengkampanyekan dan gerakan anti perburuan paus di Jepang.<sup>14</sup>

Jepang diketahui bahwa merupakan negara anggota yang melakukan perburuan paus yang sering dipandang sebagai negara yang melanggar aturan dari IWC terutama dalam hal *scientific whaling* yang dianggap oleh negara *anti-whaling* sebagai pelanggar

---

<sup>10</sup> Malgosia Fitzmaurice, "International Convention for the Regulation of Whaling," United Nations Audiovisual Library of International Law, (2017) : 2

<sup>11</sup> Commercial Whaling-International Whaling Commission, <http://iwc.int/commercial> diakses pada 3 September 2021

<sup>12</sup> Commercial Whaling-International Whaling Commission

<sup>13</sup> Fynn Holm. "After Withdrawal from The IWC: The Future of Japanese Whaling," The Asia-Pacific Journal vol 17 No 4 (Februari 2019): 2

<sup>14</sup> Greenpeace, History of Greenpeace campaign to save the whales, <http://www.greenpeace.org/seasia/ph/What-we-do/oceans/whaling/campaign-history>, diakses pada 4 September 2021

aturan dari moratorium.<sup>15</sup> Meskipun demikian, Jepang merupakan anggota yang aktif memberikan kontribusi pada IWC. Jepang aktif memberikan ide ide alternatif dalam upaya membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi dari pertemuan yang diadakan oleh IWC.<sup>16</sup>

Jepang melakukan permohonan kepada IWC terhadap moratorium agar dapat dicabut dengan memberikan bukti ilmiah dengan memberikan jenis ikan paus yang memiliki populasi yang besar untuk dapat meningkatkan kuota yang ditentukan.<sup>17</sup> Namun upaya itu gagal setelah pertemuan oleh IWC pada tahun 2018 di Brazil, dengan alasan IWC tetap menolak untuk dimulainya kembali perburuan paus pada spesies yang memiliki kelimbahan yang tinggi.<sup>18</sup>

Melalui Wakil Menteri Perikanan, Jepang memutuskan untuk mengundurkan diri dari IWC pada tanggal 26 Desember 2018, dan negara Jepang akan memulai kembali perburuan paus secara komersial.<sup>19</sup> Pada 1 Juli 2019, tiga kapal pemburu paus milik Jepang berlayar hingga ke laut lepas dan kembali membawa hasil tangkapannya berupa dua ekor paus jenis minke. Hal ini menandakan bahwa Jepang secara resmi sudah memulai perburuan paus kembali secara komersial.<sup>20</sup> Keluarnya Jepang dari IWC menyebabkan negara tersebut tidak terikat lagi dengan organisasi anti pemburuan paus tersebut dan dapat melakukan perburuan paus untuk tujuan komersial.

---

<sup>15</sup> Japan's whale research program (JARPA and JARPA II)

<sup>16</sup> Annual Report of the International Whaling Commission 2005

<sup>17</sup> Fisheries Agency with The Institute of Cetacean Research, "Whales and Whaling," hal 4, <https://www.jfa.maff.go.jp>, diakses 4 September 2021

<sup>18</sup> Organization, "Why Japan's exit from international whaling treaty may actually benefit whales", <https://www.sciencemag.org/news/2019/01/why-japan-s-exit-internationalwhaling-treaty-may-actually-benefit-whales>, diakses pada 4 September 2021

<sup>19</sup> Fynn Holm, "After Withdrawal from The IWC: The Future of Japanese Whaling," *The Asia-Pacific Journal* vol 17, no 4 (Februari 2019) : 1-16

<sup>20</sup> Justin McCurry, *Japan Resumes Commercial Whaling For First Time in 30 Years*, *The Guardian*, 2019, <https://www.theguardian.com/world/2019/jul/01/japan-resumes-commercial-whaling-for-first-time-in-30-years> , diakses pada 10 September 2021

Greenpeace merupakan suatu organisasi internasional sebagai aktor non-negara berbentuk organisasi non-pemerintah (NGO) yang mana bergerak dalam bidang perdamaian lingkungan. Pada awalnya, fokus utama Greenpeace hanya pada anti nuklir dan perlindungan terhadap hewan laut terutama ikan paus. Greenpeace memperluas isu kampanyenya, mulai dari perubahan iklim, pencemaran lingkungan akibat bahan kimia yang beracun, perdagangan berkelanjutan yang bersifat ramah lingkungan<sup>21</sup> Greenpeace mulai melakukan kampanye anti penangkapan ikan paus melalui kampanye anti perburuan paus pada tahun 1975, Greenpeace juga meluncurkan kapal untuk menghadapi armada penangkapan ikan paus di laut lepas, kapal ini bertujuan untuk menghalangi dan juga menghentikan kegiatan perburuan ikan paus.<sup>22</sup>

Greenpeace sebagai organisasi yang menentang perburuan paus melakukan gerakan untuk menjaga lingkungan dengan mempublikasikan pemulihan lingkungan. Greenpeace mendokumentasikan dan membawa hasilnya kepada publik dalam rangka untuk mempengaruhi opini publik mengenai perburuan ikan paus. Televisi dan media lainnya menyiarkan dengan tema perburuan ikan paus kepada kalangan masyarakat dunia dan memberikan informasi mengenai kejamnya metode perburuan paus.<sup>23</sup> Greenpeace juga memaksa menaiki kapal penangkap ikan paus milik Jepang di wilayah pantai Jepang dan meminta untuk kembali ke pelabuhan pada puncak musim perburuan ikan paus.<sup>24</sup> Pada saat Jepang melakukan penangkapan ikan paus dengan kedok

---

<sup>21</sup> Greenpeace, "Sejarah Greenpeace" <http://greenpeace.org/seasia/id/about/sejarah-greenpeace/>, diakses pada 4 September 2021

<sup>22</sup> Global Nonviolent Action Database , Greenpeace campaigns against whaling, 1975-1982 <https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/greenpeace-campaigns-against-whaling-1975-1982>, diakses pada 3 September 2021

<sup>23</sup> Greenpeace, *In Harm's Way : Twenty Five Years of Saving Whales*, <http://www.greenpeace.org/wp-content/uploads/legacy/Global/usa/report/2007/8/in-harm-s-way-twenty-five-yea.html>, diakses pada 18 Oktober 2021

<sup>24</sup> Greenpeace, *In Harm's Way : Twenty Five Years of Saving Whales*, <http://www.greenpeace.org/wp-content/uploads/legacy/Global/usa/report/2007/8/in-harm-s-way-twenty-five-yea.html>, diakses pada 18 Oktober 2021

ilmiahnya, Greenpeace langsung menggelar aksi protes dengan membawa balon besar ke arah kapal penangkap yang akan menuju ke Artarika.

Dengan keluarnya Jepang dari IWC, maka aktivitas perburuan paus secara komersial kembali dilakukan Jepang yang sebelumnya memiliki batasan terhadap jumlah perburuan paus ketika menjadi anggota dari IWC. Greenpeace hadir dalam upaya membantu dan melakukan kampanye anti perburuan paus. Kondisi tersebut menimbulkan ketertarikan bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait strategi Greenpeace dalam aksi kampanye anti perburuan paus di Jepang pasca keluarnya Jepang dari IWC.

## 1.2 Rumusan Masalah

Jepang merupakan salah satu negara yang telah melakukan kegiatan perburuan paus sejak lama. Perburuan paus telah menjadi budaya dan kebutuhan masyarakat Jepang dan menjadi penolong pengatasan malnutrisi dan kelaparan pasca Perang Dunia II. Dibentuknya IWC pada tahun 1949 bertujuan untuk menciptakan perburuan paus berkelanjutan serta pada tahun 1987 diberlakukan moratorium yang mengurangi kegiatan perburuan ikan paus secara komersial pada beberapa negara. Namun, di lain sisi Jepang tetap melakukan perburuan paus yang melanggar konsensus di IWC dan moratorium tersebut. Greenpeace sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam kampanye anti perburuan paus di Jepang mulai dari tahun 1975 menginvestigasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Jepang. Puncaknya, pada tahun 2018 Jepang memutuskan untuk keluar dari IWC dan memberikan polemik baru terhadap usaha yang telah dilakukan oleh Greenpeace selama ini. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap strategi Greenpeace dalam aksi kampanye anti perburuan ikan paus di Jepang pasca keluarnya Jepang dari IWC.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah: “Bagaimana strategi Greenpeace dalam upaya kampanye anti perburuan paus di Jepang tahun 2018-2021?”

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi Greenpeace dalam kampanye anti perburuan paus di Jepang tahun 2018-2021 pasca keluarnya Jepang dari IWC.

### 1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, tulisan ini dapat memberikan kontribusi dan pengembangan kepastakaan Ilmu Hubungan Internasional terutama pada bidang organisasi internasional
2. Secara praksis, tulisan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pembaca dan pihak terkait pada isu ini seperti organisasi Greenpeace
3. Secara akademis, untuk menerapkan pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama di bangku perkuliahan

### 1.6 Studi Kepustakaan

Untuk memperdalam pemahaman penulis dan menambah khazanah dalam pengetahuan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur terkait sebagai tinjauan kepastakaan. Pertama, tulisan dari Ko Nomura yang berjudul “*Antiwhaling Groups in Japan: Their Historical Lack of Development and Relationship With National Identity*”<sup>25</sup> Pada tulisan ini menjelaskan bagaimana aktifitas anti-whaling di Jepang yang mana dibatasi oleh kerangka yang menghubungkan perburuan paus

---

<sup>25</sup> Ko Nomura, “Antiwhaling Groups in Japan: Their Historical Lack of Development and Relationship With National Identity”, *Journal of Enviroment & Development*, 2019, 1-22

dengan kepentingan nasional. Sama halnya yang terjadi di negara Norwegia, yang mana dikaitkan dengan nilai dan masalah-masalah untuk mendapatkan arti penting. Dimana gerakan anti perburuan paus berkembang, ada hubungan antara perburuan paus dan kerangka perlindungan hewan.

Pada negara Norwegia, hubungan antara perburuan paus dan kepentingan nasional menyebabkan lemahnya aktivitas anti-whaling dan lemahnya pengaruh proteksionisme hewan, serta budaya politik yang menekankan konsensus. Pada negara Jepang, hubungan antara perburuan paus dan kepentingan nasional sebagian besar ada karena protes permusuhan oleh aktivis internasional, yang tidak disukai dalam budaya politik Jepang yang menghindari konflik. Mereka menciptakan kesan bahwa aktivitas dari anti perburuan paus didasarkan pada ide-ide asing dan juga bahwa perlindungan perburuan paus terkait dengan perlindungan bisnis dan budaya tradisional, sebuah pandangan yang dieksploitasi oleh pemburu paus.

Melalui usaha yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Jepang dalam upaya menangani, mulai dari menjauhkan diri dari kelompok internasional yang menekan pada politik modern, menyarankan bahwa penantangan terhadap aksi perburuan paus bukanlah penantangan terhadap tradisi negara Jepang dengan laporan perburuan paus yang tidak dilakukan secara nasional. Dengan begitu, kebijakan mereka mengizinkan penangkapan ikan paus di bagian daerah pesisir pantai dengan jumlah skala kecil dan menantang perburuan paus yang dilakukan secara komersial. Ketika masalah perburuan ikan paus menjadi dipolitisasi, pandangan terhadap konservasi ekosistem mereka dapat mencegah penggabungan terhadap gerakan anti perburuan paus dan perlindungan hewan. Namun yang terjadi terhadap anggota parlemen Jepang memperoleh beberapa



modal politik dengan mendukung Jepang terhap perburuan ikan paus karena sudah menjadi tradisi dan budaya.

Kedua, penelitian dari Mike Dinaher yang berjudul "*Why Japan Not Give Up Whaling*".<sup>26</sup> Penelitian ini menjelaskan mengapa negara Jepang tetap melanjutkan perburuan paus komersial terlepas dari kritik asing. Jepang mengatakan bahwa tetap melanjutkan perburuan paus dengan beberapa alasan, pertama perburuan paus merupakan tradisi dan merupakan simbol dari ketergantungan terhadap makanan hasil laut, dengan begitu Jepang melakukan persiapan supaya tidak membiarkan negara manapun yang melarang terhadap penangkapan perburuan paus meskipun mendapatkan ancaman internasional. Kedua, perburuan ikan paus Jepang berada dalam aturan ICRW. Ketiga, Negara Jepang percaya bahwa dengan perburuan ikan paus yang berkelanjutan yang mereka lakukan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang diawasi oleh pihak IWC. Keempat, tidak ada gerakan anti perburuan ikan paus domestik yang signifikan. Dengan begitu, tekanan asing tidak menemukan sekutu yang signifikan dalam hal politik domestik Jepang untuk dapat disejajarkan. Hal ini dijelaskan dari pihak Badan Perikanan mengatakan bahwa masalah perburuan paus menjadi permasalahan yang dibahas oleh negara dan juga mengenai ketahanan pangan.

Ketiga, penelitian dari Dan Goodman yang berjudul "*Japanese Whaling and international Politic*".<sup>27</sup> Pada penelitian ini menjelaskan beberapa masalah politik internasional yang mana berkaitan dengan perburuan paus di Jepang. Menggambarkan posisi negara anggota yang *anti-whaling* perburuan paus dari IWC dan juga anggota yang mendukung penggunaan berkelanjutan dari sumber daya laut, dan termasuk pada

---

<sup>26</sup> Mike Danaher. "Why Japan Will Not Give up Whaling," *Pacifica Review; Peace, Security, & Global Change*, 14:2 (Juni 2002) : 105-120

<sup>27</sup> Dan Goodman, "Japanese whaling and international politics," *Senri Ethnological Studies* vol 84 (2018) : 325-335

ikan paus. Pada penelitian ini juga menjelaskan bahwa kegagalan peram Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti-perburuan paus dalam hal menyelesaikan sifat bipolar dan disfungsional IWC. Pada pertemuan tahunan ke-59, pada tahun 2007, IWC memulai proses yang dikenal dengan "Masa Depan IWC", yang bertujuan untuk mendapatkan kompromi dari anggota yang pro-perburuan paus dan anti-perburuan paus untuk menyelesaikan sifat bipolar, konfliktual dan disfungsional organisasi.

Negara anggota IWC yang *pro-whaling* menegaskan bahwa ikan paus harus dikelola seperti halnya dengan sumber daya kehidupan laut lainnya. Mereka berpendapat bahwa penantangan terhadap perburuan ikan paus yaitu mempertahankan moratorium, terlepas dari status ketersediaan ikan paus yang bertentangan dengan ICRW, yang dinyatakan dalam paragraf terakhir pada pembukaan ICRW yang berbunyi untuk menyediakan konservasi pada ketersediaan ikan paus dengan begitu memungkinkan perkembangan tata kelola bidang industri perburuan paus.

Keempat, penelitian dari Motohiro Kawashima yang berjudul "*Decoding the Whaling Issue Using Media Theories*".<sup>28</sup> Pada tulisan ini menjelaskan bagaimana sejarah dan peran Greenpeace dalam melakukan dan membentuk persepsi publik tentang perburuan ikan paus. Dalam sejarahnya, Greenpeace melakukan bentuk protes dan aksi kampanye anti perburuan paus melalui rekaman televisi dari perahu karet kecil dan juga dengan bantuan kapal.

Pada bulan Juni 1975 kapal armada Greenpeace mengirimkan bantuan perahu karet untuk mengejar armada perburuan paus oleh negara Uni Soviet di laut pasifik. Dengan aktivis Greenpeace yang berada di kapal, mereka berhasil menghentikan kegiatan perburuan paus dan menangkap perahu yang dilakukan oleh negara Uni Soviet.

---

<sup>28</sup> Motohiro Kawashima, "Decoding the Whaling Issue Using Media Theories", *World Whaling: Historical and Contemporary Studies*, *Senri Ethnological Studies* 104, Hal 249-253

Selain itu, Greenpeace juga berhasil melindungi ikan paus yang sudah kena tombak yang mana mengenai bagian punggung paus.

Greenpeace melakukan kampanye anti perburuan paus dengan mempertimbangkan pengaruh media secara kuat. Dalam mempublikasikan konfrontasi tersebut, Greenpeace berhasil memproyeksikan tiga citra sederhana namun kuat ke dalam benak publik: yang pertama, para pencinta lingkungan pemberani sebagai pahlawan yang tanpa pamrih mempertaruhkan nyawa mereka untuk tujuan lingkungan, yang kedua, paus tidak berdaya sebagai makhluk kecil dan tidak berdaya yang dikerdilkan oleh kapal Uni Soviet yang menjulang tinggi, dan yang terakhir para pemburu paus yang jahat sebagai mesin pembunuh tanpa mempertimbangan dampak yang akan terjadi.

Melalui media dapat menyiratkan bahwa sebuah ide yang disampaikan memiliki efek yang signifikan pada persepsi dan juga tindakan yang dilakukan. Begitupun bagi Greenpeace melalui usaha terhadap aksi protes dan aksi kampanye dalam menghentikan perburuan paus yang terancam punah.

Tulisan terakhir dari penelitian Fynn Holm yang berjudul “*After Withdrawal from The IWC: The Future of Japanese Whaling*”<sup>29</sup> Pada penelitian ini menjelaskan bagaimana perkembangan ikan paus oleh negara Jepang sejak sebelum bergabung dalam IWC hingga akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari IWC. Pada bulan Desember 2018 Jepang memutuskan untuk mengundurkan diri dari IWC dan memulai perburuan ikan paus secara komersial pada bulan Juli 2019. Penelitian ini juga meninjau kembali empat komunitas pesisir yang masih melakukan perburuan paus untuk melihat bagaimana komunitas ini telah berkembang selama moratorium perburuan paus dan

---

<sup>29</sup> Fynn Holm, “After Withdrawal from The IWC: The Future of Japanese Whaling,” *The Asia-Pacific Journal* vol 17, no 4 (Februari 2019) : 1-16

apa prospek dan tantangan yang mereka hadapi ketika perburuan paus komersial dilanjutkan.

Keputusan yang dilakukan oleh Jepang mengundurkan diri dari IWC merupakan seruan dari oportunistik oleh Pemerintah Jepang pada saat itu ketika iklim pada negara negara barat yang menantang perjanjian internasional ini, dan juga memiliki manfaat tambahan dalam rangka menyingkirkan perburuan paus di Antartika. Yang tidak hanya menelan subsidi kepada publik secara besar besaran, seperti pada kasus Dana Rekontruksi Tohoku tetapi juga menimbulkan banyak kritik barat. Namun demikian, pemerintah Jepang masih cukup sadar terhadap citra publiknya dan akan menetapkan kouta yang ketat untuk mendukung mengklaimnya bahwa perburuan ikan paus yang bersifat berkelanjutan.

## **1.7 Kerangka Konseptual**

### **1.7.1 Role of Civil Society**

Sebagian besar dari pengamat memiliki pandangan mengenai varian dari civil society , yang mana terdapat komponen kelembangan dari civil society yang terdiri dari kelompok sukarela dari jenis yang berbeda atau sama lain. Kelompok yang dimaksud ini adalah masyarakat, serikat kerja, kelompok swadaya, asosiasi, yayasan, agen layanan sosial dan juga tambahan dari civil society merupakan konsep yang majemuk. NGOs adalah bagian dari civil society yang mana memainkan peran penting dalam upaya mengaktifkan partisipasi warga dalam hal pembangunan bidang sosial, ekonomi dan politik dalam upaya merancang ataupun mempengaruhi kebijakan. Terdapat tiga elemen dari gagasan civil society. Elemen yang dimaksud ini adalah negara, perusahaan swasta, dan juga masyarakat sipil. civil society juga mencakup spektrum aktor dengan berbagai

tujuan, konstitusi, struktur, derajak organisasi, tingkat sumber daya, konteks budaya, ideologi, strategi dan juga pendekatan.<sup>30</sup>

Pada abad ke-18 muncul gagasan modern mengenai konsep civil society. Beberapa ahli teori politik mulai dari Thomas Paine ke George Hegel yang mana mengembangkan gagasan mengenai civil society sebagai sesuai yang sejajar tapi terpisah dari negara. Tahun 1990 konsep civil society menjadi minat baru saat menjadi tren menuju demokrasi yang membuka ruang untuk civil society dan juga kebutuhan dalam upaya menutupi kesenjangan yang kian makin besar dalam layanan sosial yang diciptakan oleh penyesuaian struktural dan perubahan lainnya di negara-negara berkembang.<sup>31</sup>

Konsep ini merajut pada tulisan oleh Sudha Mohan pada artikel jurnalnya yang berjudul “*Role and Relevance of Civil Society Organisations*”<sup>32</sup>. Dalam tulisannya, Sudha Mohan menjelaskan mengenai hubungan civil society dengan NGOs dalam upaya untuk mencapai keberhasilan melalui peran dari civil society. Sudha Mohan juga menambahkan terdapat tiga strategi berdasarkan *Role and Relevance of Civil Society Organisations* :

1. Strategi persuasif : strategi ini melibatkan pihak yang berwenang dalam upaya penyelesaian masalah, biasanya melalui pengumpulan data dan presentasi informasi dari satu sisi, dan juga melalui petisi.
2. Strategi kolaboratif : strategi ini melibatkan pertemuan terbuka dengan pihak berwenang dengan melakukan lobi kepada pemerintah daerah, departemen dan juga badan pembuat keputusan lainnya.

<sup>30</sup> Chandhoke, M., 200 , “The Limits of Global Civil Society”.

<sup>31</sup> Dr. Aisha Ghaus-Pasha, “Role of Civil Society Organizations in Governance”, 6th Global Forum on Reinventing Government”, Seoul, Republic of Korea, 24 – 27 May 2005

<sup>32</sup> Sudha Mohan, “Role and Relevance of Civil Society Organisations”, The Indian Journal of Political Science , Vol.63, No. 2 dan 3, Juni-September 2002.

3. Strategi konfrontasional : strategi ini berbentuk demonstrasi seperti pawai dan morcha. Dengan begitu, melalui memberikan suara dalam upaya mempengaruhi kebijakan sama pentingnya dengan penentu keberhasilan dalam keikutsertaan civil society dalam berpartisipasi.

### 1.7.2 Shaming

Menurut Peter Spiro, tiap-tiap INGO memiliki identitas dan tujuannya sendiri, seperti perlindungan hak-hak azasi manusia, wanita, dan anak, hingga perlindungan lingkungan dan hewan.<sup>33</sup> INGO merupakan aktor yang memiliki identitas dan bergerak salah satunya untuk tujuan normatif yaitu mempertahankan norma yang mereka yakini sebagai “kebenaran”.<sup>34</sup> Oleh karena itu, menjadi *norm entrepreneur* atau yang dapat dipahami sebagai agen perubahan norma merupakan salah satu peran INGO dalam dunia internasional.

Berdasarkan kamus Cambride, *shaming* merupakan aktivitas mengatakan secara publik bahwa seseorang, perusahaan, telah berperilaku buruk atau ilegal. Menurut Schimmelfennig, *shaming* merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mengekspos dan mengutuk negara yang melanggar aturan dan norma Internasional.<sup>35</sup> Faradj Koliev mendefinisikan *shaming* sebagai suatu strategi yang mengekspos kesalahan aktor dan kepatuhan yang buruk atas aturan dan norma yang umum diterima.<sup>36</sup> *Shaming* dalam

---

<sup>33</sup> Peter J. Spiro. “Non-governmental Organization in International Relations (Theory)”, *The State of the Art*. (2013): ch.9 no.223-243.

<sup>34</sup> Balasz I. Szent, Peteris F Timofejevs. “Selective norm promotion in international development assistance: the drivers of naming and shaming advocacy among european non-governmental development organisations”. *International Relations*. Hal. 6

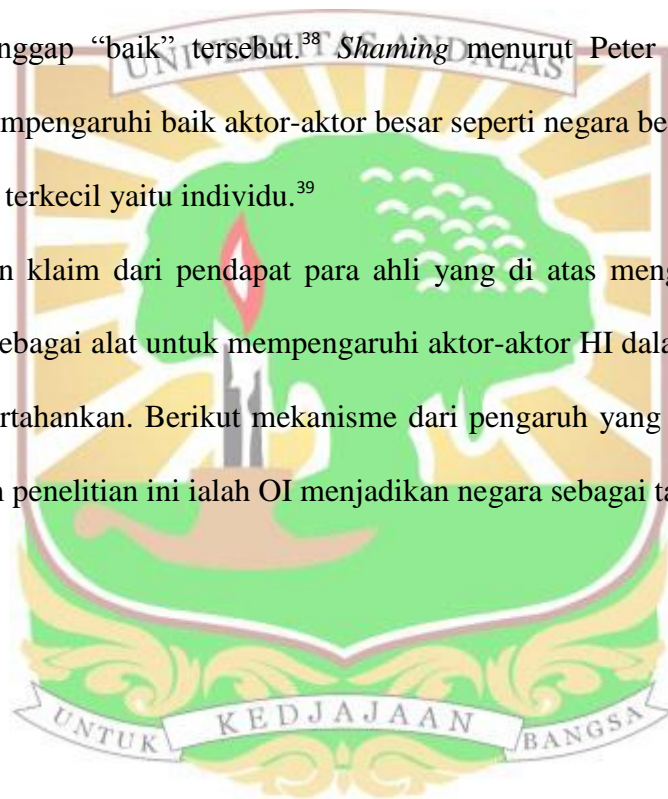
<sup>35</sup> Frank Schimmelfennig. “The community Trap: Liberal Norms, Rhetorical Action, and the Enlargement of the European Union” *International Organization*. Hal 44-80

<sup>36</sup> Faradj Koliev. “Naming and Shaming: The politics and effectiveness of social pressure in the ILO”. Stockholm University. Hal 14

hubungan internasional dapat dipahami sebagai upaya dalam mempengaruhi suatu pihak untuk patuh terhadap norma.<sup>37</sup>

*Shaming* pada dasarnya merupakan bentuk gabungan dari organisasi pihak yang berlawanan dengan suatu norma. Hal tersebut dapat bekerja dengan cara membangun narasi baik atas suatu norma sehingga mempengaruhi aktor internasional maupun nasional untuk setuju dengan suatu norma tersebut. Aktor maupun yang bertentangan dengan norma tersebut akan mendapatkan tekanan dan desakan agar dapat mematuhi norma yang dianggap “baik” tersebut.<sup>38</sup> *Shaming* menurut Peter J. Spiro memiliki potensi untuk mempengaruhi baik aktor-aktor besar seperti negara beserta kepala negara hingga unit aktor terkecil yaitu individu.<sup>39</sup>

Berdasarkan klaim dari pendapat para ahli yang di atas mengenai cakupan dan proses *shaming* sebagai alat untuk mempengaruhi aktor-aktor HI dalam mematuhi suatu norma yang dipertahankan. Berikut mekanisme dari pengaruh yang diberikan *shaming* yang mana dalam penelitian ini ialah OI menjadikan negara sebagai target *shaming*:

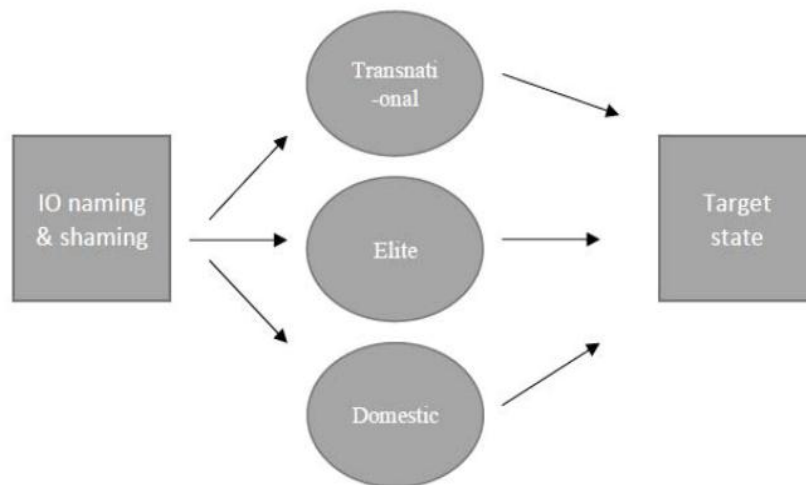


---

<sup>37</sup> Michal Kolmas. “International pressure and Japanese withdrawal from the International Whaling Commission: when shaming fails”. Australian Journal of International Affairs, 2020: 1

<sup>38</sup> Michal Kolmas. “International pressure and Japanese withdrawal from the International Whaling Commission: when shaming fails”. Australian Journal of International Affairs, 2020: 5

<sup>39</sup> Peter J. Spiro. “Non-governmental Organization in International Relations (Theory)”, *The State of the Art*. (2013): 5



**Gambar 1. Mekanisme pengaruh shaming terhadap Negara**

Sumber:[https://www.researchgate.net/profile/FaradjKoliev/publication/336314761\\_Shaming\\_and\\_democracy\\_Explaining\\_interstate\\_shaming\\_in\\_international\\_organizations/links/62ac46a5a920e8693efba647/Shaming-and-democracy-Explaining-inter-state-shaming-in-international-organizations.pdf](https://www.researchgate.net/profile/FaradjKoliev/publication/336314761_Shaming_and_democracy_Explaining_interstate_shaming_in_international_organizations/links/62ac46a5a920e8693efba647/Shaming-and-democracy-Explaining-inter-state-shaming-in-international-organizations.pdf)

Pertama, *shaming* oleh OI atas pelanggaran atau ketidak patuhan suatu negara atas aturan dan norma tidak hanya menggerakkan aktor domestik negara tersebut, namun juga dapat menggerakkan aktor transnasional. Hal ini bekerja jika adanya kesamaan norma yang dianut oleh OI pelaksana *shaming* dengan aktor-aktor transnasional lainnya. Dengan adanya perluasan mobilisasi, maka tekanan sosial yang diberikan oleh adanya *shaming* dapat mempengaruhi status kepatuhan suatu negara terhadap norma yang dipertahankan.<sup>40</sup>

Kedua, OI dapat menciptakan tekanan sosial melalui interaksinya dengan pejabat suatu negara. Pejabat berkemungkinan merespon positif *shaming* yang dilakukan OI. Hal ini dapat terjadi karena Pejabat juga memiliki kepentingan untuk

<sup>40</sup> Faradj Koliev. "Naming and Shaming: The politics and effectiveness of social pressure in the ILO". Stockholm University. Hal 19-20



menyelamatkan popularitasnya, menghindari kritik internasional, atau karena memang mereka memiliki pandangan yang sama dengan konteks *shaming* yang yang diberikan OI. Dengan merasuknya pengaruh *shaming* hingga ke pihak pejabat domestik, maka kemungkinan suatu negara untuk mematuhi norma yang terkandung dalam *shaming* akan semakin besar.

Ketiga, *shaming* yang diberikan OI dapat mempengaruhi grup kepentingan seperti LSM hingga individu suatu negara untuk turut bersuara atas permasalahan norma yang dikandung dalam aktivitas *shaming*. Hal ini dapat terjadi karena adanya sebagian LSM maupun individu yang menganut atau mendukung norma yang tengah didukung melalui aktivitas *shaming*. Diteruskannya tekanan oleh *shaming* kepada aktor domestik suatu negara yang menjadi target *shaming* akan dapat memberikan pengaruh terhadap negara mereka.

Ketiga alur mekanisme diatas dapat dibahas secara terpisah dan digabung. Pada umumnya, *shaming* oleh OI tersebut dapat mempengaruhi aktor transnasional, pejabat atau elit politik, dan LSM hingga individu pada skala domestik dengan adanya syarat kesamaan norma dan kepentingan masing-masing pihak. Dengan demikian tiga alur mekanisme persebaran pengaruh *shaming* oleh OI terhadap negara ini dapat terjadi.

Terdapat dua bentuk *Shaming* oleh Michael Kolmas yaitu<sup>41</sup> :

1. *Soft*

*Shaming*

Merupakan bentuk cara mempengaruhi kepatuhan terhadap norma tidak mengancam tanpa melakukan kekerasan. Dalam praktiknya, *soft shaming* ini dapat berupa kritik terhadap institusi internasional, catatan diplomasi, dialog, dan juga artikel media.

---

<sup>41</sup> Michal Kolmas. "When Shaming Fails: Japanese withdrawal from the International Whaling Commission". <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/when-shaming-fails-japanese-withdrawal-from-the-international-whaling-commission/> (diakses pada 19 November 2021)

## 2. *Hard Shaming*

Merupakan bentuk cara mempengaruhi kepatuhan norma dengan cara-cara yang lebih radikal dan bahkan melibatkan kekerasan. Dalam praktiknya, *hard shaming* dapat berupa penciptaan konfrontasi, protes dalam suatu komunitas lokal, menghambat pelaksanaan suatu norma yang dianggap salah, aksi massa, hingga melakukan penyerangan.

### 1.8 Metodologi Penelitian

#### 1.8.1 Pendekatan atau Jenis Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang mana metode ini lebih berfokus kepada data-data linguistik dari pada data-data numerik yang kemudian digunakan dalam analisa data. Namun, data numerik akan tetap digunakan untuk membantu proses analisis. Metode penelitian kualitatif dalam hal mengembangkan dan menjelaskan penelitian dilakukan dengan cara membandingkan studi kasus, metode historis, dan juga termasuk argumen yang beralasan.<sup>42</sup>

Jenis penelitian ini yaitu deskripsif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data-data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan juga membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Peneliti berfokus pada strategi Greenpeace dalam kampanye anti perburuan paus setelah Jepang keluar dari IWC.

---

<sup>42</sup> Paul R. Viiotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations and World Politics*, (Uppers Saddle River: Pearson, 2011), Hal 17.

## **1.8.2 Batasan Penelitian**

Agar penelitian ini tidak meluas dari apa yang telah dirumuskan, peneliti membatasi analisis strategi yang dilakukan Greenpeace dalam menghentikan perburuan paus setelah Jepang keluar dari IWC tahun 2018-2021. Penulis mengambil batasan penelitian karena Jepang keluar dari IWC pada tahun 2018.

## **1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis**

Unit analisis atau variabel dependen merupakan objek kajian yang perilakunya akan diteliti dan dianalisis. Dengan demikian yang menjadi unit Analisis dalam penelitian ini adalah strategi yang dilakukan oleh Greenpeace dalam kampanye anti perburuan paus setelah Jepang keluar dari IWC. Sementara itu, unit eksplanasi atau variabel independen merupakan unit yang dapat mempengaruhi perilaku unit analisis. Dalam hal ini yang menjadi unit eksplanasi adalah Negara Jepang. Selanjutnya, level analisis atau tingkat analisis merupakan tingkat atau posisi dari objek kajian yang akan diteliti atau dianalisis. Tingkat analisis penelitian ini berada pada level system internasional. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan Greenpeace dalam kampanye anti perburuan paus setelah Jepang keluar dari IWC.

## **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan mempelajari informasi berupa data yang didapat dari berbagai tempat. Penelitian ini menggunakan data campuran yaitu data primer dan sekunder. Data primer melalui laporan-laporan berupa dokumen-dokumen dari website resmi dan profil atau website Greenpeace dan pemerintahan Jepang yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis. Data sekunder didapatkan dari beberapa sumber tertulis yang digunakan

seperti buku, jurnal ilmiah dan laporan penelitian untuk mengumpulkan fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penelitian. Selain itu, situs berita internasional serta nasional juga dijadikan sebagai sumber data yang juga membahas mengenai aktivitas *whaling*.

### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Analisa data merupakan suatu proses penyusunan data oleh peneliti untuk membuat sebuah penjelasan atau objek secara logis dan sistematis<sup>43</sup>. Tahap analisis penelitian ini akan dimulai dengan mengumpulkan data-data mengenai aktivitas perburuan paus oleh Jepang. Lalu dilihat bagaimana strategi Greenpeace dalam menghentikan aktivitas perburuan paus. Kemudian strategi-strategi tersebut dilihat apakah dapat memenuhi norma internasional dengan menggunakan konsep *role of civil* dan konsep *shaming*, dikarenakan perburuan yang dilakukan oleh Jepang sudah menjadi kebudayaan bagi masyarakat. Konsep *shaming* hanya bisa mempengaruhi negara atau aktor dalam upaya menghentikan perburuan paus, maka dari itu diperlukan konsep *role of civil society* untuk mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perburuan paus.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dimuat penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menggambarkan fakta terkait isu yang akan dibahas peneliti, selanjutnya terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual, serta metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini.

---

<sup>43</sup> Barbara D. Kawulich, *Data Analysis Technique in Qualitative Research*, (State University of Georgia:Georgia), hal 97.

## **BAB II : JEPANG SEBAGAI NEGARA PEMBURU PAUS**

Pada bab ini menjelaskan mengenai bagaimana sejarah Jepang yang sudah dari dahulu telah memulai perburuan ikan paus secara komersial hingga sampai saat sekarang ini angka pemburuan ikan paus oleh Jepang semakin meningkat.

## **BAB III : GREENPEACE SEBAGAI ORGANISASI NON PEMERINTAH TERHADAP ISU PERBURUAN PAUS**

Pada bab ini menjelaskan sejarah dan profil Greenpeace serta setelah upaya dan strategi yang dilakukan Greenpeace dalam kampanye anti perburuan paus setelah Jepang keluar dari IWC.

## **BAB IV : ANALISIS STRATEGI GREENPEACE DALAM KAMPANYE ANTI PERBURUAN PAUS SETELAH JEPANG KELUAR DARI INTERNATIONAL WHALING COMMISSION (IWC)**

Pada bab ini membahas mengenai bagaimana strategi-strategi Greenpeace dalam kampanye anti perburuan paus setelah Jepang keluar dari IWC.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan hasil penelitian serta saran dari peneliti terhadap penelitian selanjutnya.

